

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BITUNG DALAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR INDUSTRI PT. STEMAR JAYA

Stefanus Bonifasius Pasumah¹
Marlien Lopian²
Daud Liando³

Abstrak

Masalah subsidi BBM tampaknya masih akan sulit dihapuskan di negeri ini. Setidaknya jika ingin dihapus subsidi BBM memerlukan waktu karena secara ekonomi masalah BBM tersebut akan bersinggungan dengan terkait langsung dengan kenaikan harga- harga biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pengawasan pendistribusian solar industri di PT. Stemar Jaya Bitung. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung, selama ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam proses pengawasan adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap pendistribusian solar industri oleh PT Stemar Jaya.

Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian, BBM Solar.

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk "subsidi bahan bakar minyak (BBM)". Jumlah subsidi BBM yang di anggarkan dalam APBN, selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis finansial/ekonomi 1997/98. Pemerintah bertekad untuk mengurangi subsidi BBM, dan menyatakan hal itu antara lain dalam UU No. 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menegaskan penghapusan subsidi BBM dapat dicapai pada tahun 2004.

Subsidi BBM sendiri telah menjadi issue yang ramai dibicarakan masyarakat, dengan topik perbincangan cukup luas meliputi apakah subsidi BBM itu membebani APBN atau apakah iadapat di benarkan secara ekonomi. Apakah subsidi tepat mengenai sarannya? Apakah subsidi BBM merupakan kebijakan yang perlu diteruskan, apakah pemberian subsidi BBM juga merupakan pola yang di tetapkan negara- negara lain? Bagaimana kaitan antara subsidi BBM dengan harga BBM, dan seterusnya adalah contoh dari topik yang di bicarakan berkenaan dengan subsidi BBM.

Pertanyaan kritis yang belakangan dikemukakan adalah apakah yang namanya pemberian "subsidi BBM" itu di Indonesia benar- benar terjadi? Apakah akuntansi yang melandasi angka- angka subsidi BBM itu tepat penggunaannya? Walaupun subsidi BBM telah menjadi topik dari pembicaraan sehari- hari namun mengenai istilah "subsidi BBM" itu sendiri, faktor- faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana upaya mengatasinya nampaknya belum menjadi pemahaman yang sama di kalangan anggota masyarakat, termasuk tokoh politik dan pejabat pemerintah.

Gambaran dasar mengenai subsidi BBM yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, mekanisme penyediaan BBM di Indonesia, Kecenderungan perdagangan minyak Indonesia, serta kaitan subsidi BBM dan APBN. Selain menilai pelaksanaan subsidi BBM di Indonesia, lebih jauh tulisan ini mengusulkan langkah- langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM dengan memperbaiki pola konsumsi energi nasional penekanan diberikan pada pembangunan infrastruktur energi non-BBM untuk mempercepat pelaksanaan diversifikasi sumber daya energi, sebagai bagian pula dari upaya mengurangi ketergantungan pada minyak dan menghilangkan subsidi BBM.

Dalam implementasi BBM bersubsidi itu, BPH Migas tak lagi menerapkan sistem Kartu Kendali melainkan menggunakan Kartu Fasilitas. Kelebihan menggunakan Kartu karena secara teknologi terintegrasi dengan sistem pencatatan transaksi perbankan serta memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen SAMSAT yang telah di kembangkan POLRI. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan diimplementasikannya Sistem Kartu Fasilitas ini, yaitu: Pertama, Pemerintah (BPH Migas) menjadi tahu persis berapa jumlah BBM terutama bensin dan solar yang didistribusikan melalui SPBU di suatu daerah. Kedua, bisa mengidentifikasi jumlah kendaraan bermotor yang mengisi BBM dalam satu hari, termasuk mengetahui lokasi SPBU dan volume BBM yang digunakan pengendara motor. Ketiga, pemma bisa mengidentifikasi apakah kendaraan tersebut sudah membayar pajak atau belum, dan bagi kepolisian bisa memantau keberadaan kendaraan yang bersangkutan.

Dilain pihak sangat dimungkinkan subsidi BBM memang masih di

perluan. Pertimbangannya, karena daya beli masyarakat kita yang masih sangat lemah. Tapi sayangnya, banyak kalangan menilai, kebijakan subsidi BBM yang di berlakukan pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Banyak pengguna BBM yang tak sepatutnya malah ikut-ikutan menikmati subsidi BBM. Bahkan, ada yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Akibatnya, biaya subsidi bukannya menurun malah makin membengkak.

Berdasarkan kajian Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, tidak tepatnya sasaran subsidi BBM itu berakar dari permasalahan lantaran belum optimalnya fungsi pengawasan dalam proses pendistribusian BBM bersubsidi maupun yang non subsidi. Lemahnya proses pengawasan itu karena selama ini karena belum kuatnya jalinan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya dapat menimbulkan isu kelangkaan BBM dan pelahgunaan BBM bersubsidi. Kondisi ini, pada gilirannya dapat menciptakan masalah-masalah baru disektor BBM yang menghambat pertumbuhan ekonomi lintas sektoral.

Barangkali, kita sudah terlalu lama di manjakan oleh murahnya harga BBM. Maka jika naik sedikit saja, kita akan langsung teriak. Padahal, murahnya BBM itu karena disubsidi. Dan subsidi jelas-jelas sangat mengganggu keuangan negara. Anggaran belanja negara yang mestinya bisa di manfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Permasalahan inti dari BBM kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, adalah belum optimalnya proses pengawasan pendistribusian BBM di seluruh NKRI, hingga berdampak pada timbulnya kelangkaan BBM di sejumlah daerah. "Disamping itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi juga di sebabkan belum jelasnya alokasi

kelompok penggunaan BBM bersubsidi pada sejumlah daerah," jelasnya.

Lain halnya dengan pelaku usaha, yang memerlukan BBM (solar) untuk industri, penetapan kebijakan pemerintah tidak memberikan subsidi untuk solar industri, menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha industri, namun pada sisi lain ketersediaan pasokan solar untuk industri tidaklah seperti pasokan solar bersubsidi yang biasanya dijual di SPBU yang selalu habis, tetapi harga eceran tertinggi tidak tetap setiap bulannya, tergantung dari pasaran yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina VII Depot Bitung. Seharusnya pihak Pertamina selalu memberikan informasi kepada setiap pelaku industri, untuk perubahan harga tersebut, agar dapat di ketahui oleh setiap pelaku industri. Namun pada kenyataannya, perubahan harga solar industri ini tidak disosialisasikan oleh pihak Pertamina, tetap hanya di informasikan kepada pihak distributor penyalur solar industri, yang menjadi rekan dari Pertamina, sehingga retan sekali terjadi manipulasi harga, maksudnya apabila harga sudah turun, tetapi masih di jual dengan harga yang masih tinggi, hal ini tentu saja merugikan pihak pelaku industri, dan berdampak kepada masyarakat yaitu meningkatnya harga jual produksi yang tinggi. Perlu diketahui pula bahwa harga eceran solar industri untuk masing-masing pelaku industri untuk perkapalan, berbeda untuk hotel, berbeda pula untuk PLN.

Pemerintah daerah Kota Bitung dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung, terlihat tidak cepat tanggap dalam menyikapi pemeriksaan legalitas perizinan industri, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindistribusian dan perdagangan Kota Bitung seperti halnya yang terjadi di PT. Stemar Jaya,

ditemui hal serupa yaitu lemahnya pengawasan oleh dinas perindustrian dan perdagangan mengenai pemeriksaan izin perindistribusian minyak solar industri PT. Stemar Jaya. Selain itu kurangnya pelaksanaan pemeriksaan untuk ketersediaan pasokan minyak solar industri, hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi yang baik antara kedua belah pihak, dikarenakan tenaga pemeriksaan dinas perindustrian dan perdagangan kota Bitung, belum menetapkan bidang penyimpangan yang sering terjadi selain itu kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh dinas perindistribusian dan perdagangan kota Bitung dalam mendukung proses pelaksanaan pengawasan yang ada.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. Sarwoto (2010:94) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Selain itu Sarwoto (2010:94) juga mengungkapkan bahwa indikator-indikator suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif diantaranya yaitu ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi oleh karena itulah, dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik

pokok adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan.

Menurut Winardi (2010:226) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sedangkan menurut Basu Swasta (2005:7) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil yang diinginkan". Sedangkan menurut Komaruddin(1994:104) "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti". Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya." Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: "pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan." atau "suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya".

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada

kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif. Sugiyono (2007:20). Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha pengungkapan masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

1. Dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian yaitu Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi :
 - Pengawasan terhadap ketersediaan pasokan solar industri.
 - Pengawasan terhadap solar industri yang dipasarkan.
2. Pengawasan manajerial ditingkat pimpinan, kepala bagian distribusi dan pegawai.
Informan dalam penelitian ini yaitu :
 1. Kepala seksi perlindungan konsumen Disperindag Kota Bitung.
 2. Kepala seksi industr logam, mesin, elektronika, dan aneka
 3. Manajer Bagian Pemasaran PT. Stemar Jaya
 4. Karyawan, staf, sopir di PT. Stemar Jaya
 5. Pelaku industri pengguna Solar Industri

Hasil Penelitian

Dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas dalam Bidang

Perindustrian dan Perdagangan, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi: aparat pengawasan dan sarana/prasarana. Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas maka dari hasil wawancara dengan Kasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut: “Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Barang dan Jasa yang ada di Kota Bitung sangat di tunjang oleh adanya kompetensi aparatur dan disamping itu tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan“.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah terhadap penyaluran solar industri dapat terlaksana jika ditunjang oleh tersedianya aparatur dan memiliki kompetensi dari pekerjaan yang ditangani dan selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan. Kemudian wawancara lainnya dengan Bagian Umum dan Perlengkapan pada Disperindag Kota Bitung yaitu: Perlengkapan kantor dan sarana lainnya dalam mengerjakan aktivitas di bidang pengawasan sudah cukup tersedia dan sudah cukup menunjang pelaksanaan pengawasan, walaupun tidak semuanya tersedia dengan lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan ternyata perlengkapan yang ada Disperindag Kota Bitung sudah tersedia secara lengkap dan mendukung aktivitas fungsi pengawasan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa faktor yang menunjang terhadap pelaksanaan pengawasan, sudah tersedia. Sebab berhasil atau tidaknya suatu visi dan misi dalam melakukan pengawasan

adalah Aparatur Pengawasan dalam mengerjakan pekerjaan dibidang pengawasan dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pengawasan kinerja Pemerintahan Daerah khususnya pada Disperindag Kota Bitung.

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung, dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan, maka peneliti menetapkan indikator dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karena itulah dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Dalam melakukan penilaian fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan Disperindag Kota Bitung terhadap PT Stemar Jaya sebagai penyalur /distributor Solar Industri.

Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyaluran Solar Industri oleh PT Stemar Jaya Bitung yang selama ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan selama ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat waktu, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam proses pengawasan adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan

pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap pendistribusian solar industri oleh PT Stemar Jaya.

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian dari masing-masing bidang pengujian dari masing-masing bidang penyimpangan yang sudah ditelusuri belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelidikan selanjutnya di samping itu pengujian yang telah dilakukan belum fleksibel, alasannya karena hasil pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat dalam memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya efektivitas dalam penyelidikan terlihat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian dilihat dari faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung adalah aparat pengawasan yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap pendistribusian solar di PT Stemar Jaya Bitung, sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparat pengawas (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi

pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan selain itu pihak pengawas sudah memiliki kompetensi dalam menangani setiap pekerjaan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung.

Selanjutnya faktor sarana dan prasarana yang dilakukan selama ini dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung sudah mendukung ketiga fungsi pengawasan. Sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, komputer, sarana lainnya menunjang aktivitas pengawasan yang ada pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi merupakan hal yang mendesak untuk terus ditingkatkan. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi Gubernur tahun 2013, pada kesempatan tersebut Menteri ESDM bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sekjen Menbudpar dan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum memberikan paparan, realisasi BBM bersubsidi Semester I tahun 2013 adalah sebesar 5,4 Juta KL atau 106% dari kuota yang ditetapkan, mengingat porsi subsidi BBM dalam APBN sangat besar dengan terjadinya over-kuota. Subsidi BBM ditargetkan sekitar Rp 95 triliun, namun karena perubahan kondisi global dan potensi realisasi BBM bersubsidi melebihi kuota, maka diperkirakan subsidi dapat mencapai lebih dari Rp 120 triliun. Realisasi BBM tahun ini jauh diatas target yang tentunya akan mengganggu APBN. Oleh karena itu, diperlukan peran daerah mulai dari perencanaan kebutuhan BBM bersubsidi, sosialisasi, dan melakukan pengawasan pendistribusiannya, karena baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mempunyai kepentingan yang sama sehingga pos APBN di sector ESDM benar-benar dapat dioptimalkan

untuk pemenuhan kebutuhan energy masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia memintah Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengawasi secara ketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2012, BP Migas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan terkait penggunaan BBM bersubsidi baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Distribusi BBM harus diawasi secara ketat, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi ini penting, karena sangat bermanfaat bagi negara baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak untuk jangka pendek adalah menyelamatkan sekaligus membantu mengurangi beban subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara untuk jangka panjangnya dalam rangka meningkatkan ketahanan energi. Sedangkan untuk penyaluran setiap daerah punya kuota tersendiri, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Kuota itu harus dijaga kerana didasarkan pada volume setara 40 juta kilo liter. Amanat itu harus dipertahankan sehingga tidak terlampaui.

Selama ini ada indikasi penggunaan BBM bersubsidi di tahun ini akan melampaui kuota 40 juta kilo liter yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang APBN. Ini karena pada awal Agustus 2013 pemakaian BBM bersubsidi sudah mencapai 54 persen lebih, sementara saat ini baru pertengahan tahun. Masih ada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya Lebaran, Natal dan sebagainya dimana penggunaan BBM bersubsidi akan mengalami peningkatan, sehingga

kuotanya harus tetap dijaga. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memintah menambah kuota BBM bersubsidi kira-kira 2 sampai 4 kilo liter untuk mengantisipasi hari-hari besar keagamaan tersebut.

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah kota Bitung melalui dinas perindistribusian dan perdagangan terhadap pendistribusian solar industri di PT.STEMAR JAYA dapat terlaksana jika ditunjang oleh tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dari pekerjaan yang ditangani dan selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung, selama ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam proses pengawasan adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap pendistribusian solar industri oleh PT Stemar Jaya.

Saran

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung diharapkan lebih baik lagi kedalam melakukan koordinasi dengan PT. Stemar Jaya, khususnya untuk kedatangan pasokan solar dari Pertamina, agar diperoleh data yang akurat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung diharapkan

lebih meningkatkan lagi hasil pengujian kualitas solar untuk industri, dengan melengkapi aparat dengan pendidikan dan latihan sesuai dengan bidangnya, dan melengkapi sarana dan prasarana untuk pengujian solar.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung diharapkan lebih pro aktif untuk memperoleh informasi yang up to date mengenai harga pasaran solar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang dijual oleh PT. Stemar Jaya Bitung. Pihak manajerial PT. Stemar Jaya diharapkan lebih meningkatkan aturan bagi para pegawainya, dan peningkatan kualitas Sumber Daya melalui pengadaan inventaris dan pelatihan-pelatihan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan aktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, Ferdinand. 2000. Energy Economics, a modern introduction. Netherland: Kluwer Academic Publishers.
- Barnes, Philip. 1995. Indonesia: the political economy of energy. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies
- Collins, Tom. 2013. National oil companies: restructuring, commercialization and privatization. Private Consultant.
- Gie, Kwik Kian. 2004. Apakah subsidi BBM sama dengan uang keluar? Bisnis Indonesia, 22 November 2004.
- Grana, Judistira K. 2009. Metode penelitian kualitatif. Edisi ketiga. Bandung: Primaco Akademika Garna Foundation.
- Komite Pengawas Persaingan Usaha. 2003. Kajian industri minyak dan gas bumi. Jakarta: KPPU.
- Masseron, Jean. 1990. L'economie des hydrocarbures. Paris: Institut Francais du

- Petrole.
- Nugroho, Hanan. 2004. Increasing the share of natural gas in national industri and Energy consumption: infrastructure development plan? Jakarta: Perencanaan Pembangunan IX/3/2004, h. 20-33.
- Nugroho, Hanan. 2004. Pengembangan industri hilir gas bumi Indonesia: tantangan dan gagasan. Jakarta: Perencanaan Pembangunan IX/4/2004.
- Nugroho, Hanan. 2004. Penyediaan BBM Nasional, Masalah Besar Menghadang. Jakarta: Kompas, 6 Juni 2004.
- Nugroho, Hanan. Financing Indonesia's natural gas infrastructure.. INDOGAS 2005: the 2nd international conference, Jakarta, 17-20 Januari 2005
- Nugroho, Hanan, et all. 2004. Gas energy pricing in Indonesia for promoting the sustainable economic growth. Procceding: The 19th World Energy Congress & Exhibition, Sydney, 5-9 September 2004.
- Nugroho, Hanan, et all. Forthcoming. Indonesia: deregulation of power industry after the implementation of new electricity law.
- Nugroho, Hanan. 2004. Percepat infrastruktur untuk mendongkrak pemakaian gas bumi. Koran Tempo, 30 November 2004.
- Nugroho, Hanan. 2004. Subsidi BBM bukan uang keluar, tapi mesti ditekani. Bisnis Indonesia, 2 Desember 2004.
- Meleong, Lexy, J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Peirce, William. 1996. Economics of the energy industries. Connecticut: Praeger Publishers.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung.
- Suseno, Franz. 2005. Jangan tunda pencabutan subsidi BBM. Kompas, 14 Januari 2005.
- World Bank. 2000. Indonesia oil and gas sector study. Washington: The World Bank.
- Widodo, Hanan Nugroho et. all. 2004. Modelling Indonesia's energy and infrastructure by INOSYD. Prosiding: Kongres World Energy Council, Komite Nasional Indonesia, Jakarta: November 2004.